



PT. BPR BKK JATENG (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 068 /Kep-Dir/IV/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO),

Menimbang : a. bahwa menunjuk surat dari Kepala Cabang Semarang Nomor 074/ND/BKK-07/IV/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri Pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Nomor: 142/Kep-Dir/VI/2022, Pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat;

c. bahwa untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena pengunduran diri maka diperlukan adanya uang pisah sesuai dengan kemampuan perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

7. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara:
- Nama : Edwin Adi Wicaksono
Tempat, Tgl. Lahir : Grobogan, 20 April 1983
Jabatan : AO Kredit
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Semarang
- KEDUA** : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;
- KETIGA** : Diberikan hak-hak yang bersangkutan sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perhitungan kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 April 2024 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada perusahaan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 30 April 2024

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA),



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
4. Kepala Cabang Semarang;
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 08 /Kep-Dir/IV/2024
Tanggal : 30 April 2024

Hak-hak yang diberikan perusahaan kepada:

Nama : Edwin Adi Wicaksono
Tempat, Tgl. Lahir : Grobogan, 20 April 1983
Jabatan : AO Kredit
Masa Kerja : 14 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Semarang

1. Sebagaimana dimaksud Diktum Ketujuh Keputuan Direksi Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), Pegawai yang dilakukan pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri, diberikan uang penggantian hak dan uang pisah sebesar 2 (dua) kali upah tetap terakhir bagi pegawai yang telah memiliki masa kerja diatas 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh ditetapkan sebagai berikut diberikan uang penggantian hak dan uang pisah sebesar 2 (dua) kali upah tetap terakhir atau Rp.4.455.628,- x 2 = Rp. 8.911.256,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
2. Seluruh biaya yang timbul dari diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Pusat.

Catatan: Sesuai pasal 58 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, jika pengusaha yang telah mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

